BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Pembangunan Manusia merupakan tujuan pembangunan utama yang menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Paradigma pembangunan modern tidak lagi berorientasi semata-mata pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup manusia melalui memenuhi kebutuhan fundamental, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Akibatnya, keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari tingkat PDRB yang tinggi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia (Amartya Sen, 1999).

Konsep pembangunan manusia secara global dibuat oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP) melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator komposit yang mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi: pengetahuan, standar hidup layak, umur panjang, dan hidup sehat. Kualitas pembangunan manusia dapat dinilai secara lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan indikator ekonomi semata (Human Development Report 2023-24, 2023). Suryani Widarta & Budi Utami, 2024) IPM menjadi salah satu indikator strategis yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional dan daerah karena mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara multidimensional.

Menurut (Amartya Sen, 1999) pembangunan pada hakikatnya adalah proses perluasan kebebasan (expansion of freedom) yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan gaya hidup yang layak. Dalam pendekatan capability approach, pembangunan manusia dipandang sebagai upaya meningkatkan kemampuan individu untuk menjalani hidup yang bernilai. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, namun juga peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2015) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses yang memiliki banyak dimensi dan mencakup perubahan dalam struktur sosial, reduksi kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia suatu daerah.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan manusia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial yang relatif tinggi. Salah satu provinsi yang menarik untuk dikaji adalah Provinsi Aceh. Aceh merupakan daerah yang, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memiliki status otonomi khusus serta memperoleh alokasi Dana pemerintah pusat yang cukup besar untuk Otonomi Khusus. Selain itu, Aceh memiliki sumber daya alam dengan banyak peluang, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, energi,

dan pertambangan. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia.

Namun demikian, berbagai indikator sosial ekonomi menekankan bahwa pembangunan manusia Aceh masih belum mencapai menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun IPM Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahun, capaian tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Di sisi lain, tingkat kemiskinan Aceh masih termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatra. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pembangunan yang dijalankan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Permasalahan pembangunan manusia di Aceh juga ditunjukkan oleh masih adanya disparitas pembangunan antar kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe memiliki capaian IPM yang relatif tinggi, sedangkan beberapa kabupaten lainnya masih berada pada kategori sedang. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat belum berkembang secara merata di seluruh wilayah Aceh.

Dari aspek pendidikan, masih terdapat perbedaan tingkat rata-rata waktu sekolah dan perkiraan waktu sekolah antar kabupaten/kota. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia karena berkontribusi pada peningkatan daya saing regional dan kualitas sumber daya manusia. (Amartya Sen, 1999) menyatakan bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk meningkatkan kemampuan manusia sehingga Peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. sangat penting untuk meningkatkan IPM.

Selain pendidikan, Kesehatan juga penting untuk pembangunan manusia. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih besar dan kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Angka Harapan Hidup (AHH), indikator kesehatan menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan IPM. Menurut (Amartya Sen, 1999), Kesehatan merupakan investasi dalam sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Faktor lain yang memengaruhi pembangunan manusia adalah kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan membuat masyarakat mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, perawatan medis, dan kebutuhan dasar lainnya. Kemiskinan juga berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan (poverty trap) yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian (Putri et al., 2020) menunjukkan bahwa Pada kabupaten/kota Aceh, tingkat kemiskinan berdampak negatif pada Indeks Pembangunan Manusia.

Selain kemiskinan, Salah satu indikator penting yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia adalah tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan penurunan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang produktif menunjukkan diri sebagai salah satu metode utama untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Dalam perspektif Islam, Tujuan pembangunan manusia tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material tetapi juga spiritual dan moral. Orang-orang

dianggap sebagai khalifah Islam di bumi, dan mereka harus mendapatkan kehidupan yang memberikan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana firman Allah SWT mengatakan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan hidup secara menyeluruh.

Teori Maqashid Syariah, yang diusulkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Al-Syatibi, menjelaskan konsep pembangunan manusia dalam Islam. Teori ini menekankan pentingnya melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Indikator pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat terkait erat dengan kelima tujuan tersebut.

Dengan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum atau syariat Islam yaitu Provinsi Aceh. Aceh menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pembangunan manusia dalam perspektif Maqashid Syariah. Implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga meningkatkan kekuatan sosial, etika, dan keagamaan masyarakat. Akibatnya, analisis pembangunan manusia di Aceh tidak cukup hanya dengan menggunakan metode konvensional, tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan Maqashid Syariah sebagai kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai IPM

masih berfokus pada pengaruh pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ekonomi menggunakan pendekatan pembangunan konvensional. Sementara itu, penelitian yang mengintegrasikan faktor-faktor pembangunan manusia dengan perspektif Maqashid Syariah masih relatif terbatas, terutama di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis dampak pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM dengan menggunakan teknik regresi data panel pada seluruh kabupaten/kota di Aceh dalam perspektif Maqashid Syariah. Dalam lima tahun terakhir, indeks pembangunan manusia Aceh Provinsi aceh ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021–2025

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	66,03	66,41	67,27	68,06	69,01	71,94
Aceh Singkil	68,94	69,22	69,62	70,14	70,75	72,62
Aceh Selatan	67,12	67,44	67,87	68,44	69,1	72,79
AcehTenggara	69,37	69,44	70,32	71,05	71,7	74,36
Aceh Timur	67,63	67,83	68,72	69,32	69,87	72,2
Aceh Tengah	73,24	73,37	73,95	74,6	75,41	78,09
Aceh Barat	71,38	71,67	72,34	72,88	73,69	76,3
Aceh Besar	73,56	73,58	74	74,53	75,13	77,46
Pidie	70,63	70,7	71,2	71,66	72,31	74,46
Bireuen	72,28	72,33	73,16	73,63	74,45	76,29
Aceh Utara	69,33	69,46	70,22	70,87	71,7	74,29
Aceh BaratDaya	66,75	66,99	67,41	68,07	68,75	72,1
Gayo Lues	67,22	67,56	68,25	68,93	69,83	72,61
Aceh Tamiang	69,24	69,48	70,43	71,35	72,32	74,78
Nagan Raya	69,18	69,31	70,1	70,78	71,72	73,87
Aceh Jaya	69,75	69,84	70,36	70,88	71,83	74,2
Bener Meriah	72,98	73,27	73,9	74,49	75,01	77,48
Pidie Jaya	73,2	73,6	74,34	74,8	75,16	77,04
Banda Aceh	85,41	85,71	86,28	86,69	87,17	89,55
Sabang	75,78	76,11	76,85	77,52	78,32	80,04
Langsa	77,17	77,44	77,82	78,36	78,81	81,77
Lhokseumawe	77,31	77,57	78,04	78,92	79,55	81,75
Subulussalam	64,93	65,27	66,2	67,1	68,04	71,63

Sumber:Badan Pusat Ststistik Provinsi Aceh

Berdasarkan data tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Aceh telah mencapai **kategori IPM tinggi**, bahkan empat daerah telah masuk kategori **IPM sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh mengalami kemajuan besar dalam hal pembangunan manusia.

Namun demikian, masih terdapat **kesenjangan pembangunan antar daerah**. Selisih antara daerah dengan IPM tertinggi (**Banda Aceh = 89,55**) dan daerah dengan IPM terendah (**Subulussalam = 71,63**) mencapai **17,92 poin**. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya merata.

Dalam perspektif **Maqashid Syariah**, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan pembangunan belum berlangsung secara seimbang di seluruh wilayah. Daerah dengan IPM tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan **akal (Hifz al-'Aql)** melalui pendidikan, **jiwa (Hifz al-Nafs)** melalui pelayanan kesehatan, serta **harta (Hifz al-Mal)** melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan IPM yang lebih rendah masih memerlukan penguatan kebijakan pembangunan agar kemaslahatan masyarakat dapat terwujud lebih merata di semua kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan grafik tersebut bisa dilihat IPM Provinsi Aceh diketahui terus meningkat setiap tahun, tetapi peningkatan tersebut masih tergolong lambat sehingga menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan ekonomi masyarakat masih perlu dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan adalah salah satu indikator utama dalam pembangunan manusia selain IPM. Tingginya tingkat kemiskinan dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat karena masyarakat miskin biasanya memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.Data kemiskinan Provinsi Aceh seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Simeulue	3,67	3,18	2,99	3,06	3,24
Aceh Singkil	1,69	1,31	1,85	1,57	1,55
Aceh Selatan	2,51	1,92	1,59	1,64	1,04
Aceh Tenggara	2,31	2,78	2,43	2,04	1,02
Aceh Timur	2,88	2,41	2,21	2,12	2,37
Aceh Tengah	3,82	2,22	2,47	3,02	2,45
Aceh Barat	2,32	2,09	2	1,88	1,9
Aceh Besar	3,04	3,1	4,09	2,14	1,99
Pidie	2,07	2,08	1,9	1,69	1,17
Bireuen	2,17	2,48	2,16	2,78	2,06
Aceh Utara	2,88	1,69	3,15	2,31	1,97
Aceh Barat Daya	2,76	2,67	3,13	2,76	1,81
Gayo Lues	1,67	1,8	1,94	1,47	1,53
Aceh Tamiang	3,5	3,06	3,12	2,3	2,34
Nagan Raya	2,06	1,61	2,22	1,39	1,62
Aceh Jaya	4,62	3,54	3,16	3,07	3,08
Bener Meriah	3,61	2,66	2,81	3,14	2,43
Pidie Jaya	1,12	1,52	0,8	0,71	0,71
Banda Aceh	2,8	3,3	3,17	2,9	2,01
Sabang	1,53	2,17	1,87	1,52	1,44
Langsa	1,87	1,33	2,23	1,98	1,37
Lhokseumawe	2,29	2,45	2,19	2,11	2,79

Sumber: Profil Kemiskinan Provinsi Aceh - BPS

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih tergolong tinggi meskipun mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Fakta ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat hingga kini menjadi tantangan utama dalam pembangunan manusia. Penurunan angka kemiskinan yang relatif lambat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Faktor pendidikan juga berkontribusi besar pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pendidikan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumb er daya manusia karena pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tabel berikut menunjukkan perkembangan indikator pendidikan di Provinsi Aceh.

Tabel 1. 3
Indikator Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Simeulue	13,76	13,9	14,08	14,28	14,53
Aceh Singkil	14,31	14,32	14,34	14,35	14,36
Aceh Selatan	14,42	14,6	14,69	14,7	14,71
Aceh Tenggara	14	14,01	14,26	14,27	14,47
Aceh Timur	13,03	13,04	13,06	13,07	13,08
Aceh Tengah	14,27	14,28	14,61	14,85	15,03
Aceh Barat	14,6	14,61	14,63	14,64	14,93
Aceh Besar	14,72	14,73	14,75	14,76	14,77
Pidie	14,46	14,47	14,49	14,5	14,52
Bireuen	14,83	14,84	14,86	14,87	14,88
Aceh Utara	14,7	14,71	14,73	14,74	14,75
Aceh Barat Daya	13,58	13,65	13,66	13,67	13,69
Gayo Lues	13,77	13,78	14,08	14,34	14,59
Aceh Tamiang	13,59	13,76	13,96	14,23	14,51
Nagan Raya	14,13	14,14	14,16	14,17	14,18
Aceh Jaya	13,98	13,99	14,01	14,02	14,06
Bener Meriah	13,46	13,47	13,71	13,72	13,73
Pidie Jaya	13,82	14,97	14,98	14,99	15,01
Banda Aceh	17,79	17,8	17,81	17,93	17,94
Sabang	13,95	14,13	14,4	14,68	14,97
Langsa	15,35	15,63	15,64	15,7	15,71

Lhokseumawe	15,2	15,21	15,27	15,54	15,55
Subulussalam	14,61	14,62	14,81	15,06	15,31

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2024

Indikator pendidikan menunjukkan adanya peningkatan waktu sekolah rata-rata dan harapan tahunan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan masyarakat. Namun demikian, rata-rata lama sekolah masyarakat masih relatif rendah sehingga kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Aceh .

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi kunci dalam pembangunan manusia. Kemampuan kerja dan produktivitas meningkat di masyarakat yang sehat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tabel berikut menunjukkan perkembangan angka harapan hidup Provinsi Aceh

Tabel 1. 4
Angka Harapan Hidup Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	**[Sk.Ipm.006] [Metode Baru] Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Simeulue	65,26	65,28	65,48	65,61	65,73
Aceh Singkil	67,39	67,43	67,65	67,78	67,89
Aceh Selatan	64,35	64,4	64,64	64,81	64,97
Aceh Tenggara	68,14	68,22	68,48	68,65	68,78
Aceh Timur	68,72	68,74	68,94	69,07	69,18
Aceh Tengah	68,85	68,86	69,05	69,18	69,3
Aceh Barat	67,98	67,99	68,19	68,34	68,48
Aceh Besar	69,78	69,79	69,99	70,14	70,29
Pidie	66,94	66,95	67,15	67,29	67,41
Bireuen	71,22	71,26	71,48	71,66	71,83
Aceh Utara	68,8	68,81	69,01	69,15	69,28
Aceh Barat Daya	65	65,06	65,3	65,48	65,65
Gayo Lues	65,47	65,53	65,77	65,92	66,03
Aceh Tamiang	69,58	69,63	69,87	70,04	70,21
Nagan Raya	69,22	69,24	69,45	69,6	69,75
Aceh Jaya	67,16	67,19	67,4	67,55	67,69
Bener Meriah	69,22	69,26	69,48	69,64	69,79
Pidie Jaya	70,14	70,18	70,41	70,6	70,77

Banda Aceh	71,45	71,52	71,79	72,02	72,17
Sabang	70,51	70,56	70,79	70,98	71,17
Langsa	69,42	69,43	69,63	69,78	69,92
Lhokseumawe	71,6	71,64	71,87	72,06	72,25
Subulussalam	64,02	64,07	64,3	64,41	64,51

Data AHH menunjukkan adanya **kesenjangan kesehatan mengidentifikasi semua kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.** Perbedaan antara daerah dengan AHH tertinggi, yaitu **Lhokseumawe (72,25 tahun)**, dan daerah dengan AHH terendah, yaitu **Subulussalam (64,51 tahun)**, mencapai sekitar **7,74 tahun**. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di bidang kesehatan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Aceh.

Dalam penelitia, AHH digunakan sebagai proksi variabel **kesehatan (X2)**. Secara teori, Semakin besar umur yang diharapkan, maka semakin meningkat pula kualitas kesehatan masyarakat, sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Dalam perspektif **Maqashid Syariah**, peningkatan AHH mencerminkan tercapainya **Hifz al-Nafs (pemeliharaan jiwa)**, yaitu tujuan syariat untuk menjaga kehidupan manusia melalui penyediaan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 1. 5
Tingkat Peangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	**[Sk.Tk.001] Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt)**				
&Amp; Provinsi	**Menurut Kabupaten/Kota (Persen)**				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	5,47	5,71	6	5,85	5,5
Aceh Singkil	8,24	8,36	6,88	6,84	6,44
Aceh Selatan	6,54	6,46	4,82	4,73	4,56
Aceh Tenggara	5,72	6,43	5,09	5	4,79

Aceh Timur	7,26	7,13	8,07	8,03	7,75
Aceh Tengah	3,05	2,61	4,44	4,42	4,21
Aceh Barat	7,3	7,09	6,09	6,07	5,58
Aceh Besar	7,62	7,7	8,28	8,17	7,93
Pidie	6,45	7,28	5,94	5,92	5,74
Bireuen	4,12	4,32	4,2	4,14	3,93
Aceh Utara	8,56	8,31	7,08	7,07	6,88
Aceh Barat Daya	3,93	4,04	4,12	4,08	3,83
Gayo Lues	2,01	1,84	2,7	2,65	2,4
Aceh Tamiang	7,97	5,87	7,38	7,21	6,95
Nagan Raya	5,11	4,99	5,84	5,74	5,22
Aceh Jaya	4,08	3,47	3,12	2,88	2,75
Bener Meriah	1,35	1,24	2,61	2,45	2,2
Pidie Jaya	6,58	3,57	4,4	4,34	3,82
Banda Aceh	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55
Sabang	4,81	3,56	4,01	3,92	2,95
Langsa	9,75	7,21	7,85	7,73	7,34
Lhokseumawe	11,99	11,16	9,15	8,78	8,47
Subulussalam	6,93	6,26	5,75	5,69	5,12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penganggur terhadap total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja dapat diserap oleh pasar tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), penganggur mencakup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Oleh karena itu, peningkatan TPT dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja, meskipun interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan pasar kerja di setiap wilayah.

Berdasarkan data tahun 2024 yang disajikan, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Aceh memperlihatkan ketimpangan tingkat pengangguran yang cukup

besar antarkabupaten/kota. Lhokseumawe mencatat TPT tertinggi sebesar 8,47%, diikuti Aceh Besar sebesar 7,93%, Aceh Timur sebesar 7,75%, Banda Aceh sebesar 7,55%, dan Langsa sebesar 7,34%. Sebaliknya, TPT terendah ditemukan di Bener Meriah sebesar 2,20%, Gayo Lues sebesar 2,40%, Aceh Jaya sebesar 2,75%, Sabang sebesar 2,95%, dan Pidie Jaya sebesar 3,82%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan tenaga kerja tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Aceh.

Secara komparatif, rata-rata TPT Provinsi Aceh pada 2024 sebesar 5,75%, lebih tinggi 0,84 poin persentase dibandingkan TPT nasional sebesar 4,91%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja di Aceh relatif lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, TPT Lhokseumawe tercatat 2,72 poin persentase lebih tinggi, Aceh Besar 2,18 poin, Aceh Timur 2,00 poin, dan Banda Aceh 1,80 poin. Sebaliknya, TPT Bener Meriah berada 3,55 poin persentase di bawah rata-rata Provinsi Aceh. Perbedaan tersebut menegaskan adanya variasi kondisi pasar tenaga kerja antardaerah yang perlu dianalisis dengan mempertimbangkan struktur ekonomi, karakteristik angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dari perspektif struktur ekonomi wilayah, tingginya TPT di pusat-pusat perkotaan dapat berkaitan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi, arus masuk pencari kerja, serta ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha. Kota-kota seperti Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Langsa berpotensi menarik lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi maupun pencari kerja dari wilayah sekitarnya. Apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi

penciptaan lapangan kerja yang memadai, persaingan memperoleh pekerjaan dapat meningkat dan menyebabkan TPT tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan penjelasan BPS (2024) bahwa TPT dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap pasokan tenaga kerja. Namun, data TPT saja belum cukup untuk membuktikan bahwa arus migrasi atau ketidaksesuaian keterampilan merupakan penyebab langsung tingginya pengangguran di wilayah tersebut.

Sebaliknya, rendahnya TPT di kabupaten seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Jaya tidak serta-merta menunjukkan kondisi kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, usaha keluarga, dan kegiatan informal tetap dapat dikategorikan sebagai penduduk bekerja meskipun menghadapi keterbatasan produktivitas, pendapatan, jam kerja, atau kepastian pekerjaan. Oleh sebab itu, rendahnya pengangguran terbuka perlu dianalisis bersama indikator lain, seperti produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, kemiskinan, setengah pengangguran, dan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, perbedaan TPT antarwilayah Aceh tidak hanya mencerminkan variasi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mengisyaratkan perlunya memperhatikan karakteristik kesempatan kerja dan struktur ekonomi masing-masing daerah.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Aceh pada 2024 memperlihatkan dua persoalan yang saling berkaitan, yaitu tingginya pengangguran terbuka di sejumlah kabupaten/kota dan kemungkinan perbedaan kualitas pekerjaan di wilayah dengan TPT rendah. Dengan TPT provinsi sebesar 5,75%, yang melampaui angka nasional sebesar 4,91%, kebijakan ketenagakerjaan perlu

diarahkan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, penguatan sektor produktif, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan produktivitas sektor informal dan pertanian. Pendekatan tersebut penting agar pembangunan ekonomi daerah dapat meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas kesempatan kerja.

Dalam penelitian ini, tingginya Tingkat pengangguran diperkirakan akan berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi pengangguran, semakin rendah pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak ikut menurun. Dari **Maqashid Syariah**, kondisi tersebut berhubungan dengan **Hifz al-Mal** (pemeliharaan harta) karena pekerjaan merupakan sumber utama memperoleh penghasilan yang halal, serta berdampak pada **Hifz al-Nasl** (pemeliharaan keturunan) karena kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi rumah tangga. Akibatnya, menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh adalah bagian penting dari meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata IPM Indonesia pada tahun 2024 adalah 75,02, sedangkan IPM Provinsi Aceh masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Aceh masih memerlukan perhatian yang lebih serius, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila ditinjau pada tingkat kabupaten/kota, pembangunan manusia di Provinsi Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama periode 2020–2025. Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai IPM setiap tahunnya. Sebagai contoh, Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan IPM dari sekitar **69,33** pada tahun 2020 menjadi **74,29** pada tahun 2025. Kota Banda Aceh meningkat dari **85,41** menjadi **89,55**, sedangkan Kabupaten Simeulue meningkat dari **66,03** menjadi **71,94**. Kondisi ini menunjukkan tren yang positif dalam pembangunan manusia Aceh.

Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan. Masih terdapat kesenjangan IPM yang cukup besar antarwilayah. Kota Banda Aceh telah mencapai kategori **IPM sangat tinggi** dengan nilai sekitar **89,55**, sedangkan beberapa kabupaten seperti Simeulue, Gayo Lues, Aceh Singkil, dan Subulussalam masih berada pada kategori **IPM tinggi** dengan nilai yang relatif lebih rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia Aceh masih berfokus pada kota-kota yang memiliki akses ke pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan daerah terpencil.

Pendidikan adalah komponen utama yang mempengaruhi pembangunan manusia karena merupakan investasi sumber daya manusia yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan seseorang. dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta produktivitas kerja. Dalam pengukuran IPM, Indikator Menurut Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), tingkat pendidikan. Kabupaten/kota yang memiliki capaian pendidikan lebih tinggi

umumnya juga memiliki IPM yang lebih tinggi. Sebaliknya, Tempat-tempat dengan akses pendidikan yang masih terbatas cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah. pembangunan manusia yang lebih rendah. Akibatnya, peningkatan kualitas Salah satu metode penting untuk meningkatkan IPM adalah pendidikan.

Selain pendidikan, kesehatan sangat penting untuk pembangunan manusia. Angka Harapan Hidup (AHH), yang menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat digunakan untuk mengukur kesehatan. Angka AHH yang lebih tinggi di suatu daerah sebanding dengan kualitas kesehatan masyarakatnya. Daerah seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya karena memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang lebih baik. Sebaliknya, wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan cenderung menunjukkan angka harapan hidup yang lebih rendah sehingga berdampak pada kualitas pembangunan manusianya.

Faktor berikutnya yang memengaruhi pembangunan manusia adalah **kemiskinan**. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal yang layak adalah masalah. Akibatnya, masyarakat miskin memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Walaupun angka kemiskinan di Provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan Aceh masih termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena tingginya kemiskinan akan menghambat

peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Selain kemiskinan, Salah satu masalah penting dalam pembangunan manusia adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan sehingga daya beli menurun dan kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan menjadi terbatas. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh tetap melebihi rata-rata nasional. Dalam Februari 2024, misalnya, TPT Aceh mencapai sekitar **5,56%**, sedangkan rata-rata nasional sebesar **4,82%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja di Aceh belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Tingginya pengangguran juga dipengaruhi oleh terbatasnya sektor industri, dominasi lapangan kerja sektor primer, juga ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan persyaratan pasar kerja.

Secara teoritis, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas pembangunan manusia. Pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara kemiskinan dan pengangguran menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pemahaman tentang pembangunan manusia kurang hanya melalui pendekatan ekonomi konvensional, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

Menurut perspektif Islam, pembangunan manusia bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh. Konsep tersebut dikenal sebagai **Maqashid Syariah**, yaitu

Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima aspek penting kehidupan Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta) termasuk dalam al-dharuriyyat al-khams. Menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq Al-Syatibi, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjaga kelima aspek tersebut secara seimbang sehingga tercipta kemaslahatan bagi masyarakat.

Hubungan antara variabel penelitian dengan Maqashid Syariah dapat dijelaskan secara konseptual. Variabel **pendidikan** berkaitan dengan **Hifz al-'Aql** karena pendidikan merupakan sarana utama dalam mempertahankan dan mengembangkan akal manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Variabel **kesehatan** berkaitan dengan **Hifz al-Nafs** karena kesehatan merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia. Variabel **kemiskinan** berkaitan dengan **Hifz al-Mal** karena kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari perlindungan terhadap harta dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, **tingkat pengangguran terbuka** berkaitan dengan **Hifz al-Nasl** karena kesempatan kerja yang layak mendukung kesejahteraan keluarga, keberlangsungan generasi, serta stabilitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan manusia dalam perspektif Maqashid Syariah bukan hanya menitikberatkan pada tingkat indikator ekonomi dan sosial, namunjuga pada pencapaian kemaslahatan yang menyeluruh melalui keseimbangan antara aspek material, moral, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menjadi sangat relevan diterapkan di Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum

Islam secara resmi adalah Aceh, sehingga keberhasilan pembangunan diharapkan tidak hanya tercermin dari meningkatnya nilai IPM, tetapi juga dari terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia di seluruh Provinsi Aceh, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran dibandingkan rata-rata nasional, serta pentingnya mengintegrasikan perspektif Maqashid Syariah dalam analisis pembangunan manusia. Islam memandang bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara seimbang antara aspek material dan spiritual. Konsep pembangunan dalam Islam tidak hanya bertujuan men capai kesejahteraan duniawi, tetapi juga kesejahteraan ukhrawi. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kesejahteraan Hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, pembangunan manusia dalam perspektif Islam harus mampu mengimbangi antara aspek ekonomi, sosial, moral, dan spiritual masyarakat.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki hubungan erat dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian oleh (Perbendaharaan et al., 2018) menemukan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, yang membantu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian lain oleh (Ani Interdiana Candra Sari1 et al., 2022) menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat berpengaruh menguntungkan untuk meningkatkan IPM karena masyarakat Kemampuan kerja orang yang sehat lebih baik. Selain itu,

penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan manusia dalam perspektif Islam harus memperhatikan aspek kemaslahatan sosial masyarakat.

Selanjutnya, penelitian oleh (Hidayat, 2020) memberikan penjelasan bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai alat alternatif untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena mengacu pada aspek sosial dan spiritual serta material. Berdasarkan berbagai teori dan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan manusia adalah konsep yang memiliki banyak dimensi dan dipengaruhi oleh banyak variabel seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syariah dinilai relevan digunakan untuk menganalisis pembangunan manusia di Provinsi Aceh karena mampu mengintegrasikan aspek material dan spiritual secara seimbang.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai pembangunan manusia masih menggunakan pendekatan pembangunan konvensional yang berorientasi pada aspek ekonomi dan sosial. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menganalisis hubungan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia tanpa mengintegrasikan perspektif Maqashid Syariah.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan penelitian pada tingkat kabupaten/kota masih relatif sedikit dilakukan. Penelitian yang secara khusus mengkaji pembangunan manusia dalam perspektif Maqashid Syariah di Provinsi Aceh masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

Penelitian terdahulu masih dominan menggunakan pendekatan pembangunan konvensional. Penelitian pembangunan manusia berbasis Maqashid Syariah masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian pada tingkat Provinsi Aceh masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji pembangunan manusia pada daerah yang menerapkan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan faktor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan sosial dalam perspektif Maqashid Syariah pada Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Provinsi Aceh)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan yang diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan yang diproksikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024?
5. Bagaimana pengaruh pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024 dalam perspektif Maqashid Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan yang diproksikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024.
2. Menganalisis pengaruh kesehatan yang diproksikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024.
3. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024.
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024.
5. Menganalisis pengaruh pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan Tingkat

Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2024 serta menginterpretasikan hasil penelitian tersebut berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, khususnya melalui dimensi Hifz al-'Aql (pemeliharaan akal), Hifz al-Nafs (pemeliharaan jiwa), Hifz al-Mal (pemeliharaan harta), dan Hifz al-Nasl (pemeliharaan keturunan).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan komponen yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan meningkatkan penelitian pembangunan manusia melalui pendekatan Maqashid Syariah yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota membuat kebijakan pembangunan manusia yang lebih efisien. melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah dan bahan

penelitian untuk peneliti yang akan melakukan studi Indeks Pembangunan Manusia, pembangunan daerah, ekonomi pembangunan, maupun pembangunan manusia dalam perspektif Maqashid Syariah.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat.

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transformasi sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan dan nilai-nilai Islam.